

DAFTAR PUSTAKA

- [BPPN] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- DJPbn. 2018. Konsepsi Pelaksana Anggaran. Surabaya: Kantor Wilayah DJPbn Provinsi Jawa Timur.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPPN Banyuwangi. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Diakses pada 7 Oktober 2024. Tersedia di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/banyuwangi/id/>.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (n.d.). *Proses penyelesaian SPM menjadi SP2D*. Diakses pada 7 Oktober 2024. Tersedia di <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8195986/kantor-wilayah-direktorat-jenderal-perbendaharaan-provinsi-utara/proses-penyelesaian-spm-menjadi-sp2d->.
- Keputusan Menteri Keuangan. 2017. Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Penbendaharaan. Keputusan Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015. Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jakarta.
- Nugroho. 2017. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Dalam Proses Pencairan Dana APBN pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. 17 (1):2442 -9708.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2023. PMK Nomor 62 Tahun 2023 Mengenai Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran. Diakses pada 7 Oktober 2024. Tersedia di <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254789/pmk-no-62-tahun-2023#:~:text=PMK%20ini%20mengatur%20mengenai%20perencanaan%20anggaran,%20pelaksanaan%20anggaran,%20serta.>